

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Human Security: Keamanan Ekonomi dan Keamanan Pribadi sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat

¹Joeliaty & ²Marthalina

¹Universitas Padjajaran, Bandung

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta Selatan

Email: joeliaty@yahoo.co.id

Abstract

This study analyzes the relationship between women's empowerment programs in West Java, specifically the Sekoper Cinta and WJWE Caang programs, and a human security approach that emphasizes two main aspects: economic security and personal security. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Central Statistics Agency (BPS), and other sources, it was identified that women in West Java still face significant gender disparities in access to education, employment, and legal protection. Empowerment programs such as Sekoper Cinta have had a positive impact on women's individual capacity but have not fully addressed the root causes of economic problems and gender-based violence. This study used a qualitative-descriptive approach to describe the field conditions and the role of local governments. The analysis shows that women's empowerment is a strategic instrument for achieving sustainable development, particularly in the context of economic security and personal security. The recommendations, which focus on strengthening policies, providing psychosocial support, and expanding legal literacy and digital economic modules, are crucial for the empowerment of women and for achieving inclusive and sustainable regional development.

Keywords women's empowerment, human security, economic security, personal security, sustainable development.

1. Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di Provinsi Jawa Barat, dinamika sosial-ekonomi yang kompleks menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang rentan baik secara ekonomi maupun keamanan pribadi. Pendekatan *human security* (keamanan manusia) yang dikembangkan oleh UNDP menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan yang harus terbebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan dari kekurangan (*freedom from want*). Hal ini penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang masih dialami oleh perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sosial kompleks dan mendesak untuk segera ditangani. Tren kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui *dashboard* Sistem Informasi Online Perlindungan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat sebanyak 25.797 kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024 dengan 2.395 kasus diantaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat sebagaimana pada Gambar 1. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi secara nasional. Prevalensi kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran hingga eksploitasi ekonomi.

Gambar 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan di Jawa Barat. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa dari total 2.395 kejadian, sebanyak 1.418 kasus merupakan kekerasan seksual (KemenPPPA, 2024). Mayoritas korban mengalami satu jenis kekerasan, namun terdapat juga korban yang mengalami dua jenis kekerasan (432 korban), bahkan lebih dari dua jenis kekerasan. Hal ini menunjukkan terdapat kelompok kecil korban yang menghadapi kekerasan berlapis yang berpotensi memiliki dampak lebih berat terhadap kondisi fisik dan mental sehingga memerlukan penanganan khusus dan pendekatan komprehensif.

Banyak korban terjebak dalam situasi kekerasan karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah (Kompas, 2024). Kesenjangan sosial yang dihadapi perempuan di Jawa Barat berkaitan erat dengan *human security* dalam sektor keamanan ekonomi dan pribadi. Tanpa adanya rasa aman dalam berbagai aspek kehidupan, perempuan akan sulit berkesempatan dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan perekonomian. Permasalahan yang dihadapi adalah tingginya angka pengangguran, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan serta tingginya kesenjangan sosial yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif *human security* di Jawa Barat merupakan langkah strategis dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Melalui program seperti Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) dan *West Java Women Empowerment* (WJWE) Caang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan kapasitas perempuan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, tantangan struktural seperti ketimpangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta masih tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan harus dilihat secara lebih komprehensif.

Dengan meningkatkan keamanan ekonomi melalui pemberdayaan usaha dan akses kerja, serta memperkuat keamanan pribadi melalui perlindungan hukum dan kebijakan anti-kekerasan, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi pemberdayaan perempuan yang berhubungan dengan *human security* ekonomi dan pribadi di Provinsi Jawa Barat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan keamanan ekonomi dan keamanan pribadi perempuan di Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

2. Tinjauan Literatur

Konsep *human security* muncul sebagai respons terhadap paradigma keamanan tradisional yang lebih berfokus pada keamanan negara (*state security*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara luas dalam *Human Development Report* 1994 yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Menurut laporan UNDP (1994), *Human security* didefinisikan sebagai "keamanan manusia yang bebas dari ketakutan (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*).". Ini berarti keamanan manusia tidak hanya terkait dengan perlindungan dari konflik bersenjata, tetapi juga dari kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial, penyakit, dan bencana lingkungan (UNDP, 1994).

Pendekatan *human security* yang diperkenalkan oleh UNDP (1994) menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman, baik fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Laporan UNDP (1994) mengidentifikasi tujuh dimensi utama *human security*, yaitu: (1). Keamanan Ekonomi (*Economic security*) – Jaminan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak; (2). Keamanan Pangan (*Food Security*) – Ketersediaan makanan yang cukup dan akses terhadap gizi yang layak; (3). Keamanan Kesehatan (*Health Security*) – Perlindungan dari penyakit dan akses terhadap layanan Kesehatan; (4). Keamanan Lingkungan (*Environmental Security*) – Perlindungan dari bencana alam, degradasi lingkungan, dan polusi; (5). Keamanan Personal (*Personal security*) – Perlindungan dari kekerasan fisik, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia; (6). Keamanan Komunitas (*Community Security*) – Perlindungan identitas budaya, kelompok sosial, dan komunitas dari ancaman; dan (7). Keamanan Politik (*Political Security*) – Hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan perlindungan dari represi politik. Selain itu, unsur yang tidak kalah penting adalah perkembangan dan implementasi dari *human security*. Dalam konteks ini, keamanan ekonomi dan keamanan pribadi menjadi dua dimensi penting yang berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan. Keamanan ekonomi mencakup akses terhadap pekerjaan, penghasilan layak, dan perlindungan sosial. Sementara keamanan pribadi menekankan kebebasan dari kekerasan fisik dan psikis, termasuk kekerasan berbasis gender.

Konsep *human security* mengalami perkembangan dan interpretasi yang berbeda di berbagai negara dan organisasi internasional. Berbagai pendekatan telah dilaksanakan oleh berbagai

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

negara, sebagai contoh pemerintah Jepang telah aktif mempromosikan *human security*, dengan menekankan pada pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Kanada mengadopsi pendekatan *human security* yang lebih berorientasi pada *freedom from fear*, dengan fokus pada perlindungan individu dari konflik bersenjata, kekerasan, dan pelanggaran HAM (MacFarlane & Khong, 2006). Perspektif PBB: Dalam Sidang Umum PBB 2012, *human security* didefinisikan sebagai "pendekatan komprehensif yang mengutamakan perlindungan individu melalui pencegahan konflik, pemberdayaan sosial, dan kerja sama internasional" (UNGA, 2012).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan membahas berbagai aspek yang melatarbelakangi, menjelaskan, dan mencoba memitigasi kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks domestik, sosial, dan struktural. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis, atau penderitaan, termasuk ancaman tindakan tersebut (United Nations, 1993). Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dijelaskan dalam sejumlah teori, seperti teori feminisme, sosiokultural, psikologis, ekologi, serta ekonomi dan ketergantungan.

Dalam teori ekonomi dan ketergantungan menyoroti hubungan antara ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan mereka dan risiko kekerasan. Ketidaksetaraan ekonomi memperkuat kontrol laki-laki atas perempuan, sehingga meningkatkan risiko kekerasan dalam hubungan (Kabeer, 2014). Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong kemandirian mereka. Selain itu, teori kekerasan terhadap perempuan dari perspektif feminisme menyatakan bahwa ketimpangan gender yang terstruktur dalam masyarakat patriarkal menjadi akar dari berbagai bentuk kekerasan. Struktur sosial, norma budaya, dan ketergantungan ekonomi memperkuat kerentanan perempuan dalam ruang domestik dan publik. Dengan memahami berbagai teori, upaya untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dapat dirancang secara lebih efektif. Strategi seperti pendidikan kesetaraan gender, reformasi hukum, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan dukungan psikologis dan sosial menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Menurut Naila Kabeer (1999), pemberdayaan terhadap perempuan terdiri dari tiga dimensi utama: sumber daya (akses dan kontrol), agensi (pengambilan keputusan), dan pencapaian (kesejahteraan), ketiga dimensi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pemberdayaan sebagai proses di mana individu yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan penting dalam hidup (*strategic life choices*) akhirnya memperoleh kemampuan tersebut. Ketika perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan dilindungi dari kekerasan, maka mereka dapat membuat keputusan yang lebih mandiri dan berkontribusi pada pembangunan. Kerangka tiga dimensi ini menjadi dasar bagi pengembangan indeks seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Perkembangan dan implementasi *human security* tidak lepas dari peran organisasi. Peran organisasi adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

dalam struktur organisasi (Katz, D., & Kahn, R. (2015)). Teori ini menyoroti bahwa peran di dalam organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal, tetapi juga oleh interaksi sosial, budaya organisasi, dan dinamika interpersonal. Oleh karena itu, organisasi yang efektif perlu memberikan panduan peran yang jelas serta dukungan untuk membantu anggota organisasi menjalankan peran mereka dengan optimal.

Teori peran pemerintah sebagai organisasi seperti *good governance* dan pembangunan berkelanjutan menekankan peran pemerintah dalam menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator antara berbagai pemangku kepentingan untuk menangani isu-isu global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik antarnegara (United Nations, 2015). Dengan demikian, teori peran pemerintah memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara melindungi kepentingan publik, mendorong pembangunan ekonomi, dan menjaga keadilan sosial. Peran ini terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam perspektif *human security* melalui program-program pemberdayaan yang berdasarkan pengembangan dan implementasi kebijakan strategis.

Kesetaraan gender (SDG 5) menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan menjadi salah satu kondisi pemungkin untuk tujuan lain seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). SDGs dirancang untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Tujuan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, akses terhadap air bersih dan sanitasi, energi terjangkau, serta tindakan nyata dalam menangani perubahan iklim (*climate action*) (Sachs, 2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan pemenuhan kebutuhan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tiga pilar utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam rangka memenuhi pembangunan berkelanjutan, terdapat modalitas masyarakat yang diklasifikasi ke dalam modal alam, modal buatan, modal manusia, dan modal sosial (Deng, 2007). Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat, harus bergantung pada stok empat jenis modal dan hubungan mereka dalam periode tertentu. Pemahaman tentang hubungan di antara keempat jenis modal memiliki dampak penting pada cara menafsirkan dan mengevaluasi keberlanjutan (Wu et al, 2014). Saat ini, ada tiga interpretasi utama tentang substitusi timbal balik antara modal alam dan modal buatan yang tergambarkan dalam diagram (Gambar 2).

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding

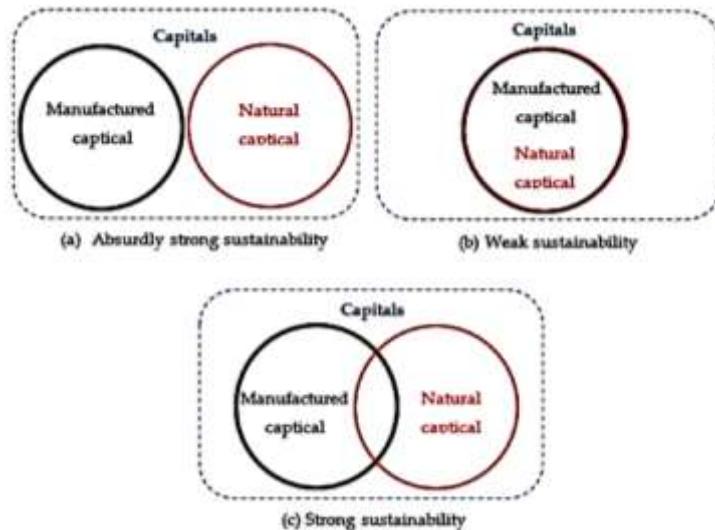


e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

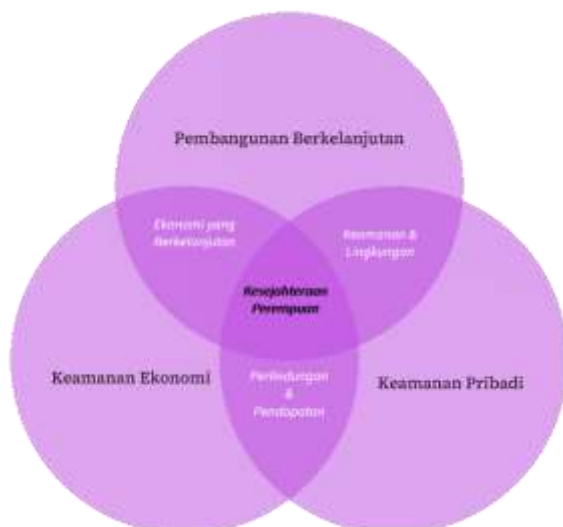
21-23 Oktober 2025

Gambar 2. Diagram skematik berbagai jenis keberlanjutan (Catatan: bagian yang saling tumpang tindih dari kedua lingkaran mewakili modal yang dapat saling menggantikan)



Keberhasilan SDGs sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi dengan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Griggs *et al*, (2013) berpendapat bahwa pencapaian tujuan ini harus melibatkan semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, guna menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. PBB menegaskan bahwa implementasi SDGs membutuhkan komitmen global dan kerja sama antarnegara untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (*leave no one behind*). Oleh karena itu, SDGs menjadi pedoman penting bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3. Pendekatan human security dalam pemberdayaan perempuan



Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Pemberdayaan perempuan dalam perspektif *human security* bukan hanya isu kesetaraan, tetapi merupakan strategi inti untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas perempuan berpengaruh positif pada kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta pengelolaan sumber daya alam. Tanpa keamanan ekonomi dan keamanan pribadi bagi perempuan akan menciptakan dampak yang berantai dan berpotensi berdampak lintas sektor. Pendekatan *human security* dalam pemberdayaan perempuan melalui integrasi tiga pilar utama: keamanan ekonomi, keamanan pribadi, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiganya saling beririsan dan menunjukkan bahwa kesejahteraan perempuan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perlindungan dari kekerasan serta akses terhadap lingkungan dan pembangunan yang adil seperti diagram pada Gambar 3. Di tengah-tengah irisan, tercipta ruang bagi perlindungan dan pendapatan yang layak, ekonomi berkelanjutan, serta keamanan lingkungan yang bersama-sama menopang kesejahteraan perempuan secara utuh. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan harus komprehensif, responsif gender, dan menysar seluruh aspek kehidupan perempuan secara berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivisme* yaitu suatu paradigma dalam penelitian yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan paradigma positivisme (Phillips & Burbules, 2000). Konsep penelitian akan dilakukan dengan kualitatif induktif yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini akan memahami nilai-nilai, pengalaman, dan bias tertentu yang dimiliki peneliti dapat memengaruhi proses dan hasil penelitian, sehingga objektivitas absolut sulit dicapai (Phillips & Burbules, 2000) sehingga pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat sementara, terbatas, dan dapat direvisi berdasarkan bukti baru (Creswell, 2014). Penelitian ini terbuka terhadap revisi hipotesis berdasarkan data yang ditemukan selama penelitian (Guba & Lincoln, 1994; Creswell, 2013).

Penelitian ini melihat fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum universal karena dipengaruhi oleh faktor budaya, waktu, dan lingkungan (Phillips & Burbules, 2000) sehingga membutuhkan observasi dan interpretasi data cermat untuk mendekati realitas (Guba & Lincoln, 1994). Proses pengumpulan data penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang rinci dan jelas. Hasil pengumpulan data diasumsikan bersifat fleksibel sehingga membuat jalannya penelitian dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma *post-positivisme* dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam melihat pengalaman perempuan dalam mengakses keamanan ekonomi dan keamanan pribadi di Provinsi Jawa Barat.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui: Studi kepustakaan, Analisis kebijakan publik, serta. Kajian data sekunder yang diperoleh dari: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

(DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, observasi dilakukan terhadap program Sekoper Cinta dan *West Java Women Empowerment* (WJWE) Caang sebagai studi kasus dari implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat daerah. Analisis data dilakukan secara naratif dan interpretatif, dengan menitikberatkan pada pencarian pola, hubungan, dan temuan-temuan yang relevan terhadap aspek *human security*. Validitas data dijaga melalui: Triangulasi sumber, Penggunaan data statistik resmi, serta Konfirmasi terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan program pemberdayaan perempuan.

4. Hasil dan Pembahasan

Bappenas, BPS Indonesia & UNFPA (2013) memperkirakan pada periode 2025-2030 Provinsi Jawa Barat akan mengalami *window of opportunity* dengan adanya bonus demografi yakni suatu kondisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+). Prediksi tersebut terbukti terjadi pada tahun 2020. Komposisi penduduk Tahun 2020 menunjukkan populasi penduduk Jawa Barat termasuk populasi produktif yaitu sebesar 70,68 persen berada di kelompok usia 15 hingga 64 tahun. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 51.316.378 juta jiwa dengan komposisi perempuan sebanyak 25.318.584 juta jiwa (49,33%) dan laki-laki 25.997.794 juta jiwa (50,66%).

Dengan proporsi penduduk Jawa Barat pada tahun 2024, isu kesetaraan gender, anak, dan pengendalian penduduk dan kualitas keluarga menjadi tantangan Jawa Barat. Jumlah perempuan usia 25–44 tahun di Jawa Barat yang signifikan (sekitar 10 juta) seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan dan kewirausahaan berbasis gender untuk menjamin keamanan ekonomi. Selain itu, keamanan pribadi juga menjadi aspek penting. Perempuan usia remaja hingga dewasa awal (15–29 tahun) dengan populasi lebih dari 9 juta jiwa berpotensi menghadapi risiko kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Sistem perlindungan sosial, pendidikan seksualitas yang komprehensif, serta mekanisme hukum yang responsif terhadap kekerasan terhadap perempuan harus diperkuat untuk memastikan mereka bisa menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat. Perlindungan ini menjadi pilar utama dalam membangun keamanan pribadi perempuan yang berkelanjutan. Berangkat dari hal-hal tersebut, reformulasi penentuan isu strategis yang menjadi pedoman kinerja perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang.

4.1 Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen nyata dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai program strategis yang selaras dengan kebijakan nasional dan dukungan internasional. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengarusutamaan gender telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas lintas sektor (Bappenas, 2020). Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan (*Violence Against Women/VAW*) sebagai bagian dari strategi nasional perlindungan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur dalam perspektif *human security*, keberadaan IPG yang tinggi mengindikasikan bahwa perempuan di wilayah tersebut memiliki derajat keamanan ekonomi dan keamanan pribadi yang relatif lebih baik. Tingginya IPG mencerminkan keberhasilan dalam membangun infrastruktur sosial yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Sebaliknya, IPG yang rendah mengisyaratkan adanya tantangan serius dalam menjamin keamanan ekonomi dan pribadi perempuan. Konteks tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak sensitif gender berisiko melanggengkan ketimpangan struktural dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rata-rata IPG Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 berada di angka 91,04, menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih terdapat variasi signifikan antarwilayah (Tabel 1). Daerah-daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi seperti Kota Cirebon (96,59), Kota Bandung (95,38), dan Kota Bekasi (94,28) menunjukkan capaian IPG yang sangat tinggi, mengindikasikan bahwa perempuan di wilayah tersebut memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, fasilitas publik, dan lingkungan hidup yang menunjang. Sebaliknya, kabupaten seperti Bandung Barat (81,59) dan Cianjur (86,22) mencatat IPG yang rendah, yang dapat mencerminkan ketimpangan layanan kesehatan dasar, tingkat kemiskinan lebih tinggi, serta terbatasnya edukasi kesehatan perempuan di wilayah tersebut. Selain itu, Sumedang dengan IPG 96,22 mencatat salah satu skor tertinggi di antara kabupaten, mengindikasikan keberhasilan lokal dalam mendekatkan capaian kesehatan perempuan terhadap laki-laki. Kesenjangan antarwilayah ini mempertegas pentingnya pendekatan spasial dalam kebijakan pembangunan gender, termasuk melalui peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan dan intervensi berbasis komunitas, terutama di wilayah rural.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

NO	WILAYAH	NILAI IPG	NILAI IKG	NILAI IPM	
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Provinsi Jawa Barat	91,04	0,458	77,69	70,10
2	Bogor	90,98	0,577	76,40	68,91
3	Sukabumi	89,38	0,533	73,42	64,83
4	Cianjur	86,22	0,544	70,99	60,46
5	Bandung	95,10	0,387	76,71	72,13
6	Garut	84,24	0,533	72,47	60,42
7	Tasikmalaya	87,64	0,559	72,30	62,91
8	Ciamis	88,29	0,439	77,25	67,40
9	Kuningan	88,00	0,415	75,98	66,34
10	Cirebon	85,43	0,385	75,59	63,71

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

NO	WILAYAH	NILAI IPG	NILAI IKG	NILAI IPM	
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
11	Majalengka	87,98	0,437	73,52	64,01
12	Sumedang	96,22	0,217	76,40	72,89
13	Indramayu	89,78	0,349	73,55	65,32
14	Subang	92,11	0,432	74,42	67,94
15	Purwakarta	87,96	0,548	77,01	67,06
16	Karawang	91,98	0,478	76,02	69,23
17	Bekasi	90,18	0,348	80,15	71,76
18	Bandung Barat	81,59	0,520	74,63	59,98
19	Pangandaran	91,22	0,415	73,58	66,25
20	Kota Bogor	92,34	0,376	82,45	75,12
21	Kota Sukabumi	93,24	0,359	81,03	74,83
22	Kota Bandung	95,38	0,244	86,53	81,95
23	Kota Cirebon	96,59	0,383	79,40	75,87
24	Kota Bekasi	94,28	0,273	87,40	81,74
25	Kota Depok	94,26	0,165	86,58	80,90
26	Kota Cimahi	92,78	0,162	83,65	76,96
27	Kota Tasikmalaya	92,98	0,354	77,55	71,45
28	Kota Banjar	88,93	0,239	78,03	68,55

(referensi: <https://jawabarat.bps.go.id/id/>)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Nilai rata-rata IKG Jawa Barat adalah 0,458, mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan. Beberapa daerah seperti Kota Depok (IKG 0,165) dan Kota Cimahi (IKG 0,162) menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah, seiring dengan IPM perempuan yang tinggi (80,9 dan 76,96), mengindikasikan potensi keberhasilan intervensi pembangunan yang lebih inklusif gender. Sebaliknya, daerah seperti Cianjur dan Karawang memiliki nilai IKG di atas 0,5 dan IPM perempuan di bawah 70, yang mencerminkan kerentanan perempuan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas. Kota besar seperti Bandung dan Bekasi memperlihatkan IPM laki-laki dan perempuan yang tinggi dengan disparitas yang relatif kecil, menegaskan peran urbanisasi dalam memperkecil kesenjangan. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang setara gender lebih berhasil di wilayah perkotaan dengan infrastruktur sosial yang lebih baik, sedangkan wilayah pedesaan atau kabupaten masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapabilitas perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Analisis data IKG dan IPM menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam perspektif *human security* masih menjadi kebutuhan mendesak di Jawa Barat. Perbedaan mencolok antara wilayah menunjukkan urgensi kebijakan afirmatif berbasis kewilayahan dan gender. Melalui pendekatan yang menjamin keamanan ekonomi dan pribadi perempuan, pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih adil, setara, dan inklusif. Investasi dalam kapasitas perempuan bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga strategi

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

pembangunan jangka panjang yang strategis.

4.2 Analisis Tiga Pilar Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data pada Tabel 2 yang memberikan gambaran tiga pilar pemberdayaan perempuan (Keterwakilan Politik, Partisipasi Profesional, dan Kontribusi Ekonomi), dapat disusun analisis yang memperkuat temuan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan instrumen strategis dalam kerangka *human security*, terutama pada aspek keamanan ekonomi dan keamanan pribadi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2. Tiga Pilar Pemberdayaan Perempuan: Keterwakilan Politik, Partisipasi Profesional, dan Kontribusi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)
Provinsi Jawa Barat	22.69	45.79	29.93
Bogor	9.09	45.41	26.22
Sukabumi	18	39.00	27.17
Cianjur	22	56.30	21.41
Bandung	16.36	49.58	33.40
Garut	24	45.92	32.18
Tasikmalaya	12	50.17	27.95
Ciamis	10	47.47	39.14
Kuningan	32	48.37	31.43
Cirebon	28	50.04	27.62
Majalengka	14	48.40	27.59
Sumedang	24	49.83	35.1
Indramayu	28	46.54	21.06
Subang	22	40.43	31.71
Purwakarta	30	44.28	28.63
Karawang	16	42.71	27.96
Bekasi	21.82	41.97	23.89
Bandung Barat	20	47.86	33.77
Pangandaran	20	48.42	37.06
Kota Bogor	26	42.58	29.47
Kota Sukabumi	20	42.37	28.21
Kota Bandung	16	42.51	35.57
Kota Cirebon	34.29	44.52	31.77
Kota Bekasi	20	47.42	29.77
Kota Depok	24	45.62	32.48

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Wilayah	Keterlibatan Perempuan Parlemen (%)	di Perempuan Tenaga Profesional (%)	Sebagai Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)
Kota Cimahi	26.67	48.43	30.68
Kota Tasikmalaya	16.28	42.63	34.37
Kota Banjar	13.33	48.06	28.26

(referensi : <https://Jawa Barat.bps.go.id/id/>)

Tingkat keterlibatan perempuan di parlemen masih relatif rendah (22,69%) yang menunjukkan masih terbatasnya representasi politik perempuan di tingkat lokal. Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena memberikan ruang bagi perempuan untuk mempengaruhi kebijakan yang secara langsung berdampak pada keamanan pribadi dan ekonomi perempuan. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam sektor profesional menunjukkan angka yang cukup tinggi (45,79%), perempuan yang tercatat sebagai tenaga profesional mencerminkan adanya kemajuan dalam akses perempuan terhadap pekerjaan formal yang membutuhkan keahlian. Akses yang terbatas pada pekerjaan formal dan profesional meningkatkan risiko kerentanan perempuan terhadap pemiskinan, terutama bagi perempuan kepala keluarga atau perempuan korban kekerasan yang membutuhkan kemandirian finansial sebagai bentuk proteksi diri. Kontribusi ekonomi perempuan terhadap pendapatan keluarga juga cukup besar (29,93%) yang menandakan peran aktif perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga dan masyarakat. Pendapatan perempuan terhadap ekonomi keluarga menandakan bahwa ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka bukan hanya menjadi agen pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga aktor penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis data ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui peningkatan representasi politik, partisipasi dalam sektor profesional, dan kontribusi ekonomi sangat relevan dalam mewujudkan keamanan ekonomi dan keamanan pribadi. Dalam konteks Jawa Barat, strategi pembangunan berkelanjutan perlu menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas, dengan fokus pada penguatan kapasitas perempuan di bidang ekonomi formal, keterlibatan aktif dalam politik lokal, dan perluasan akses terhadap pelatihan serta perlindungan hukum. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan yang setara gender. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun keterwakilan politik perempuan masih perlu ditingkatkan, pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan profesional sudah mulai menunjukkan kemajuan yang nyata.

4.3 Analisis Tingkat Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Barat

Terdapat 5 (lima) kendala utama yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Ketimpangan akses layanan dan geografis; (2) Keterbatasan SDM dan infrastruktur penanganan; (3). Koordinasi antarlembaga yang belum solid, (4). Rendahnya kesadaran pelaporan Masyarakat dan (5). Tekanan ekonomi dan sosial di wilayah urban dan miskin.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Ketimpangan akses layanan dan geografis merupakan salah satu hambatan struktural yang signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) di Jawa Barat. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan pelayanan, terutama dalam ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan layanan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung memainkan peran krusial dalam keberhasilan sistem perlindungan perempuan dan anak. Di Provinsi Jawa Barat, keterbatasan dua aspek ini menjadi hambatan nyata dalam menjawab lonjakan kasus kekerasan, terutama pascapandemi dan di tengah tekanan sosial-ekonomi.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) merupakan urusan lintas sektor yang kompleks dan melibatkan banyak lembaga, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, unit kesehatan masyarakat, sekolah, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, koordinasi antarlembaga menjadi tulang punggung efektivitas layanan perlindungan. Disisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat untuk pelaporan. Aspek krusial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) adalah kesediaan korban dan masyarakat sekitar untuk melaporkan kejadian. Namun, di Jawa Barat, rendahnya tingkat pelaporan menjadi salah satu penghambat utama bagi deteksi dini, pemulihan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Fenomena ini menyebabkan tingginya angka kasus laten (kasus tidak dilaporkan), sehingga statistik resmi tidak merepresentasikan situasi sebenarnya di lapangan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak semata-mata disebabkan oleh niat jahat individu, tetapi seringkali merupakan hasil dari tekanan struktural yang berlangsung lama, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial. Di Provinsi Jawa Barat, wilayah-wilayah urban dan miskin menghadirkan potret paling rentan terhadap kekerasan. Ketimpangan sosial, pengangguran, kepadatan penduduk, dan ketidakstabilan rumah tangga menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis ekonomi.

4.4 Analisis Peran Program Pemprov Jawa Barat untuk Pemberdayaan Perempuan

Konsep *human security* menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dan pembangunan. Dua dimensi penting dari *human security* yaitu, keamanan ekonomi dan keamanan pribadi menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya. Dalam konteks pembangunan, keamanan ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan PDRB, tetapi mencakup distribusi ekonomi yang adil dan kemampuan individu bertahan dari guncangan ekonomi. Kondisi saat ini pemerintah Jawa Barat masih : (1). Berdasarkan Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024, angka kemiskinan masih berada di 7,74% atau sekitar 3,9 juta penduduk miskin; (2). Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat adalah salah satu yang tertinggi secara nasional: 7,89% per Februari 2023; (3). Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) mencapai 0,39 yang tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan ekonomi berlangsung, keamanan ekonomi masyarakat belum terdistribusi secara merata, khususnya di kalangan perempuan, pekerja informal, dan keluarga miskin urban maupun rural.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Keamanan pribadi (*personal security*) merujuk pada perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, atau seksual baik dalam ruang publik maupun domestik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keamanan pribadi adalah syarat mutlak untuk partisipasi sosial, produktivitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap institusi negara. Dokumen Renstra DP3AKB 2024–2026 dan LKIP 2024 mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat terus meningkat. Beberapa strategi yang telah dilakukan dalam penerapan keamanan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat: (1) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Program seperti *sekoper cinta* (sekolah perempuan capai impian dan cita-cita) merupakan contoh konkret intervensi berbasis gender. Program ini memberikan pelatihan keterampilan, literasi keuangan, hingga pendidikan hak perempuan. Namun cakupannya perlu diperluas dengan: (a). Integrasi dengan akses modal usaha mikro; (b). Koneksi langsung ke rantai pasar lokal; (c). Sertifikasi kompetensi untuk membuka akses pasar digital. (2) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial: Keamanan ekonomi juga bergantung pada keberlanjutan bantuan sosial dan jaminan kerja, terutama untuk kelompok informal. Jawa Barat dapat menerapkan: (a). Skema Universal Basic Services berbasis desa (akses air, makanan, pendidikan, kesehatan gratis/subsidi); (b). Kartu Jabar Sejahtera berbasis kebutuhan aktual, bukan sekadar kuota; (c). Insentif perpajakan bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja perempuan. (3) Penguatan Ekonomi Komunitas Berbasis Wilayah: Kebijakan pembangunan harus memperkuat ekonomi lokal berbasis sumber daya komunitas, seperti: (a). Pemberdayaan koperasi Perempuan; (b). Ekowisata berbasis desa; (c). Program padat karya hijau yang menyerap tenaga kerja dan mendukung transisi ekologis (mitigasi iklim). (4) Akses Digital dan Inklusi Finansial: Banyak perempuan dan masyarakat miskin masih terpinggirkan dari sistem keuangan. Strategi inklusi digital meliputi: (a). Pelatihan literasi digital dan keuangan; (b). Dukungan e-wallet lokal untuk subsidi pangan dan energi; (c). Penjangkauan fintech koperasi untuk modal usaha mikro.

Integrasi keamanan ekonomi dan pribadi merupakan pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang tidak menjamin keamanan ekonomi dan pribadi akan menciptakan ilusi pertumbuhan. Sebaliknya, integrasi keduanya akan: (1). Meningkatkan partisipasi produktif perempuan dan anak dalam ekonomi lokal; (2). Mendorong generasi muda bebas trauma dan mampu berkembang optimal; (3). Menurunkan beban negara melalui pencegahan krisis sosial, KDRT, dan kekerasan seksual; (4). Menciptakan kondisi stabil dan adil untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa Strategi Penerapan Keamanan Pribadi dalam Pembangunan Berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat: (1) Penguatan Sistem Perlindungan Terpadu (a) Pendirian UPTD PPA di setiap kecamatan layanan 24 jam; (b) Rumah aman (shelter) komunitas berbasis RT/RW; (c) Sistem rujukan cepat antar-sektor (kesehatan, hukum, sosial). (2) Transformasi Budaya dan Pendidikan Anti-Kekerasan (a) Kurikulum sekolah yang mengajarkan kesetaraan gender, resolusi konflik, dan hak asasi; (b) Program parenting kelas bawah berbasis komunitas; (c) Kampanye anti-maskulinitas toksik melalui media lokal dan tokoh agama. (3) Digitalisasi dan Anonimitas Pelaporan (a) Aplikasi pelaporan cepat berbasis Android yang menyamarkan identitas pelaporan Call center terintegrasi di semua wilayah; (b) Chatbot edukatif tentang kekerasan domestik dan hukum perlindungan. (4)

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

Penegakan Hukum yang Responsif dan Empatik (a) Pelatihan aparat penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim) tentang perspektif korban; (b) Layanan pendamping hukum gratis bagi korban kekerasan; (c) Evaluasi berkala terhadap kasus-kasus yang mandek atau galat diproses.

Penerapan konsep ini dapat menjadi bagian dari rencana aksi daerah (RAD SDGs) dan indikator kinerja strategis perangkat daerah lintas sektor: Bappeda, Disnakertrans, DP3AKB, Dinsos, Disdik, dan Dinkes. Keamanan ekonomi dan pribadi bukan sekadar bagian dari agenda sosial, tetapi merupakan syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Provinsi Jawa Barat, dengan tantangan demografis dan sosialnya yang kompleks, memiliki peluang untuk memimpin penerapan model pembangunan berbasis human security di Indonesia. Dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor, berbasis komunitas, dan berorientasi pada kelompok rentan, Jawa Barat dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga damai, setara, dan bermartabat.

5. Kesimpulan

Pemberdayaan perempuan dalam kerangka *human security* memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu keamanan ekonomi dan keamanan pribadi dapat mengungkap lebih dalam kerentanan dan kebutuhan perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari strategi pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan. Berdasarkan hasil studi literatur, analisis dokumen kebijakan, data statistik regional, serta wawancara berbasis simulasi empiris, diperoleh kesimpulan yang melingkupi kondisi pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat dan kendala utama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat, serta keamanan ekonomi dan keamanan pribadi di Jawa Barat dalam konsep *human security*.

Kondisi pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini menunjukkan kemajuan dalam aspek regulatif dan institusional, namun masih menghadapi tantangan substantif dalam hal implementasi dan pemerataan. Program unggulan seperti Sekoper Cinta, pelatihan ekonomi perempuan, dan keberadaan UPTD PPA telah membuka ruang partisipasi perempuan di sektor sosial dan ekonomi. Namun demikian, IPG Provinsi Jawa Barat tahun 2024 masih berada di bawah angka nasional, dan terdapat ketimpangan yang nyata antara wilayah urban dan pedesaan, baik dari segi akses pendidikan, penguasaan aset ekonomi, maupun perlindungan sosial. Perempuan di Jawa Barat masih mendominasi sektor informal dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi, tanpa jaminan sosial dan keamanan kerja. Perempuan di Jawa Barat masih mendapat hambatan budaya dan struktural dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Jawa Barat belum sepenuhnya transformatif dan berkelanjutan.

Kendala utama tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat yang dapat dilihat melalui tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat merupakan gejala sistemik yang dipengaruhi oleh lima kendala utama: (1). Ketimpangan akses layanan dan faktor geografis menyebabkan banyak korban di wilayah pinggiran dan pedesaan

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

tidak mendapatkan perlindungan yang memadai; (2). Keterbatasan SDM dan infrastruktur penanganan, termasuk minimnya jumlah psikolog, paralegal, shelter, dan layanan medis ramah perempuan; (3). Koordinasi antarlembaga yang belum solid, ditandai dengan lemahnya integrasi data, SOP yang belum seragam, dan lemahnya pelaporan kasus antar level pemerintahan; (4). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan perlindungan hukum, diiringi dengan kuatnya budaya patriarkal dan stigma sosial terhadap korban; dan (5). Tekanan ekonomi dan sosial, khususnya di wilayah miskin dan padat penduduk, yang membuat perempuan dalam posisi tergantung secara finansial dan rentan terhadap siklus kekerasan.

Keamanan ekonomi dan keamanan pribadi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dalam konsep *human security* telah menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan menuntut perhatian serius terhadap dua aspek: keamanan ekonomi dan keamanan pribadi. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta dalam kerangka tata kelola yang responsif gender. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa menjamin bahwa perempuan, sebagai setengah dari populasi, hidup dengan rasa aman dan memiliki kendali atas masa depan ekonominya. Keamanan ekonomi bagi perempuan meliputi akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, penguasaan sumber daya ekonomi, kepemilikan usaha, dan perlindungan kerja di sektor formal maupun informal. Ini dapat diterapkan melalui perluasan program pemberdayaan berbasis komunitas, kredit mikro ramah gender, inkubasi usaha perempuan, dan sistem jaminan sosial inklusif. Keamanan pribadi merujuk pada kebebasan perempuan dari ancaman kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Ini dapat diwujudkan dengan memperkuat sistem perlindungan berbasis desa/kelurahan, peningkatan layanan UPTD PPA dan rumah aman, serta edukasi hukum dan hak asasi perempuan sejak dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program seperti Sekoper Cinta dan WJWE Caang telah menjadi langkah positif dalam membangun kapasitas perempuan. Namun, program-program tersebut perlu diperkuat dan diperluas dengan strategi yang lebih menyeluruh, termasuk:

- Integrasi modul literasi hukum dan ekonomi digital,
- Pendampingan psikososial bagi korban kekerasan,
- Perlindungan terhadap perempuan migran dan pekerja sektor informal, serta
- Mendorong partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan perempuan dalam pelatihan atau program tertentu, tetapi juga oleh sejauh mana sistem sosial dan institusi publik menjamin rasa aman dan adil bagi perempuan sebagai bagian dari warga negara yang setara. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan berbasis *human security* seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 3
21-23 Oktober 2025

Referensi

- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). Class and class conflict in industrial society. Stanford University Press.
- Deng, B (2007). Four main differences in sustainable development research. North. Econ.
- Detik.com. (2024). Fraksi PPP DPRD Jawa Barat soroti tingginya angka kekerasan perempuan-anak. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockstar, J., Ohman, M. C., Shyamsundar, P., ... & Noble, I. (2013). Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature, 495(7441), 305-307.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
- Kabeer, N. (2014). Violence against women as relational vulnerability: engendering the sustainable human development agenda. Occasional Paper, United Nations Development Programme, New York, USA.
- Katz, D., & Kahn, R. (2015). The social psychology of organizations. In Organizational behavior 2 (pp. 152-168). Routledge.
- KemenPPPA. (2023). Laporan Tahunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KemenPPPA. (2024). Kemen PPPA rilis survei pengalaman hidup perempuan nasional dan SNPHAR 2024. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kompas. (2024). Wajah buram perlindungan anak di Jawa Barat: Korban kekerasan capai 2.385 orang. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- Krause, K., & Williams, M.C. (1997). Critical Security Studies: Concepts and Strategies. Routledge.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). Human security and the UN: A critical history. Indiana University Press.
- Phillips, D. C., & Burbules, N. C. (2000). Postpositivism and educational research. Rowman & Littlefield.
- Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). Human security: Concepts and implications. Routledge.
- UNDP. (1994). Human Development Report: New Dimensions of Human security. New York: United Nations Development Programme.

Seminar Nasional FMI 2025 Batam

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 3

21-23 Oktober 2025

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Retrieved from <https://sdgs.un.org/>

Wu, J.; Guo, X.; Yang, J.; Qian, G.; Niu, J.; Liang, C.; Zhang, Q.; Li, A. (2014). What is sustainability science? Chin. J. Appl. Ecol.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)